

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDITOR
DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)**

WAHID HASYIM



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

disusun dan diajukan oleh

**WAHID HASYIM
A31109266**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Amiruddin, M.Si., Ak
NIP 19641012 198910 1 001

Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak
NIP 19550110 198703 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

disusun dan diajukan oleh

WAHID HASYIM
A31109266

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Agustus 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak	Ketua	1.....
2.	Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak	Sekretaris	2.....
3.	Dr. H. Arifuddin, S.E, M.Si, Ak	Anggota	3.....
4.	Drs. Yulianus Sampe, M.Si, Ak	Anggota	4.....
5.	Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak	Anggota	5.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr.H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Wahid Hasyim

NIM : A31109266

jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang ada secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

Wahid Hasyim

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, atas cinta, kasih sayang, dan kesabaran yang tidak pernah pudar serta do'a untuk peneliti hingga saat ini memberikan semangatnya.
2. Bapak Dr. H. Hamid Habbe, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak. selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan skripsi ini, sehingga setiap kendala dan kesulitan yang dihadapi penulis bisa terselesaikan.
4. Ibu Dra. Andi Kusumawati, M.Si, Ak. Selaku penasehat akademik peneliti yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga selesai.
5. Seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar di kelas perkuliahan.

6. Pimpinan Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta auditornya yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam skripsi ini.
7. Teman-teman K09nitif yang sama-sama berjuang mulai awal kuliah, mudah-mudahan tali persaudaraan ini tetap terbina sampai di ujung waktu.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Banyak momen berharga di dalamnya.
9. Teman-teman sepergaulan yang selalu mewarnai hidup penulis, memberi *fighting spirit* biar tidak malas kerja skripsi.
10. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Terima kasih atas do'a dan motivasinya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat berkah dari Allah.

Peneliti juga menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Makassar, Agustus 2013

Peneliti

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Atas Laporan Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Wahid Hasyim
Amiruddin
Kastumuni Harto

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi, keahlian audit, dan lingkup audit terhadap pertimbangan pemberian opini audit. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pertimbangan pemberian opini audit pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan variabel independen, yaitu independensi, keahlian audit, dan lingkup audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner yang dibagikan kepada responden, teknik pengambilan sampel yaitu dengan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit. Secara simultan variabel independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Kata kunci: opini audit, independensi, keahlian audit, dan lingkup audit

ABSTRACT

Factors Affecting Auditor's In Giving Up Financial Statements Audit Opinion (Study on BPK RI Representative of South Sulawesi Province)

Wahid Hasyim
Amiruddin
Kastumuni Harto

The research was conducted to determine the effect of independence, audit skills, and audit scope against the judgment granting the audit opinion. In this research, researchers examined consideration granting audit opinion on the State Audit Board Office (BPK) RI Representative of South Sulawesi province by using the independent variables, namely independence, audit skills, and audit scope. The population in this research was all auditors who working on State Audit Board Office (BPK) RI Representative of South Sulawesi province. The primary data collection method used is the method of questionnaires distributed to respondents, the sampling technique is by purposive sampling with total sample of 35 respondents. The data analysis techniques used in this research is the technique of multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing in this research indicate that the variable independence, audit skills, and audit scope have a positive and significant impact on the privision of audit opinion. Simultaneously, the variables independence, audit skills, and audit scope positive and significant impact on the privision of an audit opinion.

Keyword : audit opinion, independence, audit skills, and audit scope.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Organisasi/Sistematika	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Auditing	8
2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik	12
2.1.3 Opini Audit	16
2.1.4 Standar Pemeriksaan	18
2.1.5 Independensi	21
2.1.6 Keahlian Audit	22
2.1.7 Lingkup Audit	23

2.2	Penelitian Sebelumnya	24
2.3	Rerangka Penelitian	27
2.4	Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Rancangan Penelitian	30
3.2	Tempat dan Waktu	30
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
3.7	Instrumen Penelitian	34
3.8	Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Deskripsi Data	40
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif	42
4.1.2	Uji Kualitas Data	43
4.2	Pengujian Hipotesis	48
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	49
4.2.2	Analisis Regresi Linier Berganda	52
4.2.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	53
4.2.4	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	54
4.2.5	Uji Parsial (Uji T)	54
4.3	Pembahasan	55
BAB V Penutup		59
5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	59
5.3	Keterbatasan Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Sebelumnya	24
4.1 Demografi Responden	41
4.2 Statistik Deskriptif	43
4.3 r-tabel variabel	44
4.4 Uji Validitas Variabel Independensi (X1)	44
4.5 Uji Validitas Variabel Keahlian Audit (X2)	45
4.6 Uji Validitas Variabel Lingkup Audit (X3)	46
4.7 Uji Uji Validitas Variabel Opini Audit (Y)	46
4.8 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	48
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	50
4.10 Hasil Pengujian Regresi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rerangka Pemikiran	27
4.1 Grafik Normal P-P Plot	49
4.2 <i>Scatterplot</i> ZPRED dan SRESID	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Analisis Statistik Deskriptif	64
2 Uji Validitas dan Reliabilitas	65
3 Analisis Regresi Linier Berganda	71
4 Kuesioner Penelitian	74
5 Data Mentah	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya otonomi daerah dan adanya reformasi di bidang keuangan pada sektor pemerintah, maka terjadi perubahan pada iklim pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi juga diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban aktivitasnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan tersebut, maka perlu dilaksanakan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yang bersifat independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor independen dalam sistem pemerintahan adalah BPK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (SPKN, 2007). BPK-RI

diamanatkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. Tujuan akhir dari suatu proses auditing yaitu menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapat kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (IAI, SA Seksi 150). Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan.

Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Perumusan opini atas laporan keuangan pemerintah merupakan tahapan yang krusial dalam sebuah penugasan audit keuangan. Di samping menjadi ukuran atas kualitas laporan keuangan pemerintah, opini yang dikeluarkan auditor juga mencerminkan kualitas dari pekerjaan audit itu sendiri.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan merupakan sebuah apresiasi dari BPK RI terhadap Instansi Pemerintah (Pusat

dan Daerah) yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada dua kabupaten yang mendapatkan opini tersebut, yaitu kabupaten Gowa dan kabupaten Luwu Timur sedangkan untuk daerah lain yang terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan belum mendapatkan hasil yang optimal.

Sekarang ini banyak kalangan yang salah persepsi tentang pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan entitas. Beberapa kalangan beranggapan bahwa opini WTP yang di keluarkan oleh BPK semacam stempel bebas korupsi. Kondisi ini membuat wakil ketua BPK Hasan Bisri mengeluarkan pendapat melalui majalah warta BPK edisi Juni 2012. Menurut dia, ada perbedaan pandangan dalam memaknai laporan hasil pemeriksaan BPK antara auditor dengan masyarakat, stakeholder, bahkan entitas yang di periksa sendiri. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa opini WTP menggambarkan kondisi entitas yang mendapatkannya bersifat bebas korupsi. Sehingga apabila terjadi kasus korupsi di entitas yang mendapatkan opini tersebut, maka masyarakat meragukan pemberian opini tersebut. Ada juga yang mempertanyakan kenapa suatu entitas mendapatkan opini WTP padahal kinerjanya buruk. Atau, entitas pemerintahan yang menyatakan bahwa jika instansinya mendapat opini WTP, maka bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu yang membuat banyak kalangan menilai opini BPK tidak obyektif, bahkan ada yang menilai kalau opini BPK bisa diperjual belikan. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar.

Dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI entitas yang bersangkutan, seperti yang di amanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012). Penelitian ini akan meneliti pengaruh independensi, keahlian audit, dan lingkup audit terhadap pemberian opini audit.

Mayangsari (2003) telah melakukan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh antara kompetensi dan independensi terhadap pertimbangan opini audit. Tamtomo (2008) dalam penelitiannya menunjukkan pengaruh keahlian audit dan independensi terhadap pertimbangan opini audit.

Dalam memberikan opini, auditor juga memperhatikan tingkat materialitas. Pertimbangan auditor atas tingkat materialitas pada saat mengaudit akan memengaruhi opini audit yang dihasilkan. Semakin besar tingkat materialitas semakin auditor cenderung memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau *disclaimer*. Suatu kesalahan yang tidak material mungkin tidak akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Suatu kesalahan yang material bisa juga mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini wajar tanpa pengecualian. Materialitas sendiri diartikan sebagai besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang diluar keadaan disekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut (FASB, 1980).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Atas Laporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa yang memengaruhi pemberian opini audit atas laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi auditor BPK dalam menentukan opini audit atas laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengauditan.

- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pengauditan.

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi auditor BPK sehingga bisa mengeluarkan opini audit.
- b. Memberikan kontribusi untuk para auditor pemerintah agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil pertimbangan opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi auditor dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan. Penelitian ini hanya mengambil objek pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.6 Organisasi/Sistematika

Penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Atas Laporan Keuangan” tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, rerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrument penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengujian data dimasukkan dalam persamaan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS for windows, serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditing

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjelaskan pengertian pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Mulyadi (2011:9) menyatakan bahwa:

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK RI atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No 15 Tahun 2004 pasal 4) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Jika ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (Agoes, 2008:9):

- a) Pemeriksaan umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- b) Pemeriksaan Khusus (*Spesial Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Menurut Mulyadi (2011:30-32) pada umumnya auditing dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2) Audit kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria, dalam hal ini biasanya pemerintah.

3) Audit operasional

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu seperti mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SA seksi 110) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

Dalam melaksanakan audit ada beberapa prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor yaitu (Mulyadi, 2011:86-89):

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

2. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan

suatu kegiatan. Dengan pengamatan ini auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Permintaan keterangan (*enquiry*)

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.

4. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

5. Penelusuran (*tracing*)

Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.

6. Pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*)

Vouching merupakan prosedur audit yang meliputi:

1. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
2. Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.

7. Perhitungan (*counting*)

Prosedur audit ini meliputi:

1. Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan di tangan.

2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut cetak.

8. *Scanning*

Scanning merupakan *review* secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan ulang (*reperforming*)

Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien.

10. Teknik audit berbantuan komputer

Bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas.

2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian, 2006:247). Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Disamping itu laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar entitas, sehingga keberadaan laporan keuangan sangatlah penting guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Mardiasmo (2009:161-162) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor menilai efisiensi kinerja manajer publik, dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu para pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Agar tujuan laporan keuangan dapat dicapai, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu sebagai berikut (PP No. 71 tahun 2010) :

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan. Dan Kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pokok yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK yaitu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK yaitu laporan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.3 Opini Audit

Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (SA Seksi 150) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian

tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2011:19).

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu :

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4) Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2.1.4 Standar Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemeriksaan. SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada.

SPKN dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) yang terdiri atas :

1. PSP Nomor 01 tentang Standar Umum.
2. PSP Nomor 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
3. PSP Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.
4. PSP Nomor 04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
5. PSP Nomor 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.
6. PSP Nomor 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
7. PSP Nomor 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

SPKN berlaku bagi BPK dan akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK (SPKN, 2007).

Standar auditing atau lebih dikenal Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar ini terdiri atas :

1. Pernyataan Standar Auditing (PSA)

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk PSA. Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing.

PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan perikatan audit.

2. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT)

Standar atestasi merupakan standar yang memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (*review*, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati).

3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSAR)

Standar jasa akuntansi dan *review* merupakan standar yang memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*.

4. Pernyataan Standar Jasa konsultasi (PSJK)

Standar jasa konsultasi merupakan standar yang memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik.

5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM)

Standar pengendalian mutu merupakan standar yang memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar profesi yang ditetapkan oleh DSP IAPI (termasuk Kode Etik Profesi Akuntan Publik).

2.1.5 Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2011:26-27).

Dalam Standar Profesional akuntan Publik SA seksi 220, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk memperhankan kebebasan pendapatnya.

Menurut Arens *et al* (2008:111), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independen in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali

mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2011:27) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

2.1.6 Keahlian Audit

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SA Seksi 210).

Menurut Tan dan Libby (1997), keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu : keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seseorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman.

Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), pengertian keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan Auditor/pemeriksa harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murtanto (1998) dalam Tamtomo (2008), komponen keahlian auditor di Indonesia terdiri dari :

- a. komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman.
- b. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerjasama dengan orang lain.

2.1.7 Lingkup Audit

Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP/PSAK, maka terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit (Arens *et al*, 2008:70).

Menurut Arens *et al* (2008:70), ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit :

1. Pembatasan oleh klien.
2. Pembatasan oleh yang disebabkan oleh situasi diluar yang berada diluar kendali klien atau auditor.

Dalam SPKN (2007), lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Silky Raditya Siregar (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa	Variabel Independen : - Independensi - Keahlian Audit - Lingkup Audit - Audit <i>Judgement</i> Variabel Dependen :	independensi, keahlian audit, lingkup audit, dan audit judgement secara simultan mempengaruhi pertimbangan opini audit. Secara parsial

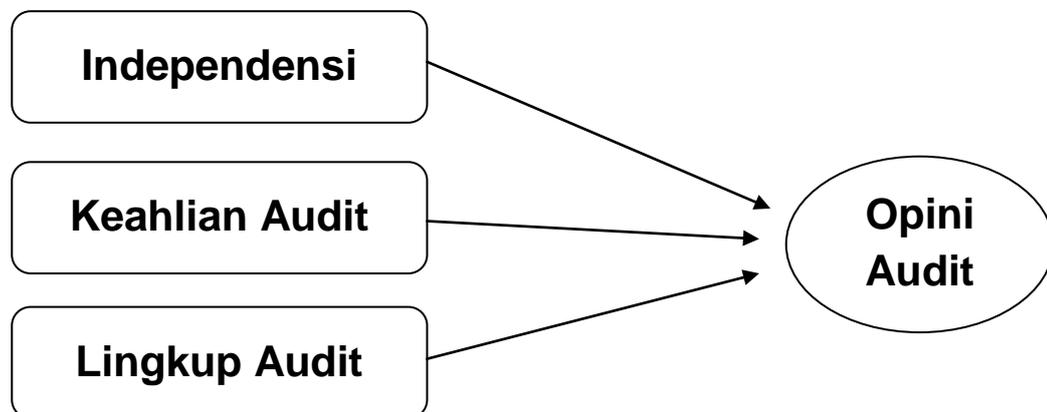
		Yogyakarta	- Pertimbangan Opini Audit	independensi, dan audit judgement berpengaruh terhadap pertimbangan opini audit, sedangkan keahlian audit dan lingkup audit tidak berpengaruh terhadap pertimbangan opini audit.
2	Sekar Mayangsari (2003)	Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi Eksperimen.	Variabel independen : - Keahlian Audit - Independensi Variabel Dependen : - Pendapat Audit	Keahlian audit dan independensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit
3	Didiek Susilo Tamtomo (2008)	Faktor-Faktor Yang Menentukan Opini Audit	Variabel independen : - Keahlian Audit - Independensi Variabel Dependen : - Opini Audit	Proses pengambilan keputusan dalam audit dipengaruhi oleh faktor keahlian dan independensi
4	Chandra Adhitya (2009)	Faktor - Faktor Yang Mendorong Akuntan Publik Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian	Variabel Independen : - Pembatasan Ruang Lingkup Audit - Laporan Keuangan Tidak Disajikan Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum	Faktor Pembatasan ruang lingkup audit, faktor laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, faktor keraguan atas

			<ul style="list-style-type: none"> - Keraguan Atas Kelangsungan Usaha Klien (<i>Going Concern</i>) - Prinsip Akuntansi yang Tidak Ditetapkan Secara Konsisten - Penekanan Atas Suatu Hal <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian 	kelangsungan usaha klien, faktor prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diterapkan secara konsisten, faktor penekanan atas suatu hal, merupakan faktor yang mendorong akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian
5	Surroh Zu'mah (2009)	Independensi dan Kompetensi Auditor Pada Opini Audit (Studi BPK Jateng)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Kompetensi <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini Audit 	Independensi auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor. Kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor. Independensi auditor dan kompetensi auditor secara simultan terdapat pengaruh secara positif terhadap hasil opini auditor.
6	Suhartini dan D.Ariyanto (2009)	Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, Dan	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Interim 	Pemeriksaan interim, lingkup audit dan independensi

		Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkup Audit - Independensi Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan Opini Auditor 	secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap pertimbangan opini audit.
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah peneliti

2.3 Rerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Independensi Dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam Standar Profesional akuntan Publik SA seksi 220, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia

berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk memperhankan kebebasan pendapatnya.

Ho : Independensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

2.4.2 Hubungan Keahlian Audit dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SA Seksi 210).

Ho : Keahlian Audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Keahlian Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

2.4.3 Hubungan Lingkup Audit dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam SPKN, lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Ho : Lingkup Audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Lingkup Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.